



Tuesday, July 27, 2021

Siaran Pers

Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen (BKSAP)
DPR RI

Sekretariat:
Ged. Nusantara III, Lt. 4
Jl. Jend. Gatot Subroto
Jakarta 10270
Indonesia

Website:
<http://ksap.dpr.go.id/>

Twitter:
[@bksapdprri](https://twitter.com/bksapdprri)

Instagram:
[@bksapdpr](https://www.instagram.com/bksapdpr)

YouTube:
[BKSAP DPR RI](https://www.youtube.com/BKSAP DPR RI)

BKSAP adalah Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak Diplomasi Parlemen. BKSAP mempunyai fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk berbagai organisasi internasional yang menghimpun parlemen dan anggota parlemen. BKSAP juga menyampaikan saran atau rekomendasi kepada Pimpinan DPR terkait masalah kerja sama antar-parlemen.

Informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Biro KSAP:
021-5715814
biro_ksap@dpr.go.id

BKSAP Mendorong Implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian Myanmar

Selasa (27/7/2021), BKSAP DPR RI mengadakan Webinar dengan topik “Peran DPR RI dalam mendorong Pelaksanaan Lima poin Konsensus ASEAN untuk Perdamaian di Myanmar” dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera. Hadir pada Webinar tersebut, Ketua BKSAP, Dr. Fadli Zon, dan Wakil Ketua BKSAP, Sihar Sitorus (FPDIP) dan Hafisz Tohir (FPAN), serta Anggota BKSAP lainnya, I Gusti Agung Rai Wirajaya (FPDIP) Himmatul Aliyah (FP-Gerindra), Arzeti Bilbina (FPKB), Muslim (FPD) dan Andi Yuliani Paris (FPAN).

Dr. Fadli Zon dalam sambutannya menyoroti peran parlemen negara-negara anggota ASEAN yang belum optimal dalam menangani krisis politik di Myanmar akibat kudeta militer Februari 2021 yang telah mencederai legitimasi demokrasi. Salah satu upaya strategis BKSAP adalah memasukan isu krisis Myanmar ke dalam *output document* di beberapa sidang parlemen tingkat internasional maupun regional sebagai bentuk dari mandat diplomasi yang diamanatkan kepada DPR RI. Politisi Partai Gerindra itu menegaskan perlunya pemaknaan yang dinamis serta progresif terhadap prinsip non-intervensi ASEAN yang harus dilihat secara holistik dengan prinsip lainnya sebagai satu kesatuan, serta urgensi untuk memiliki rasa keberpihakan terhadap hak asasi manusia untuk menghasilkan aksi nyata.

Dr. Mardani Ali Sera selaku moderator menyampaikan poin-poin yang disepakati oleh peserta diskusi bahwa parlemen sebagai pemegang mandat rakyat harus mendorong proses perdamaian di Myanmar guna menegakkan kembali demokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia di Kawasan.

Kondisi di Myanmar menjadi tantangan dan pertarungan bagi keberadaan ASEAN sebagai lembaga antar bangsa di kawasan Asia Tenggara, khususnya prinsip *non-interference*. Parlemen sebagai pemegang mandat rakyat harus mengambil bagian dalam proses perdamaian di Myanmar untuk menegakkan kembali demokrasi di kawasan. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan paling demokratis sangat diharapkan perannya. Lima poin konsensus ASEAN harus segera ditindaklanjuti, khususnya penunjukkan *Special envoy* dan bantuan kemanusiaan ke Myanmar serta masalah pengungsi di Myanmar yang harus diselesaikan secara komprehensif. Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan bahwa salah satu usulan ke depan adalah pembentukan pemerintah transisi di Myanmar untuk menjalankan pemerintah yang ada dan menyelenggarakan pemilu. *Special Envoy* diharapkan terlibat aktif.

Webinar ini mengundang empat narasumber dengan pemaparan masing-masing topik dan dilanjutkan diskusi, yaitu; Prof. Kirsten McConnachie (Professor in Law, University of Anglia) menyampaikan update informasi krisis Myanmar. Marzuki Darusman (Anggota Special Advisory Council on Myanmar) memaparkan lima poin konsensus ASEAN dan upaya resolusi penanganan konflik Myanmar. Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Sidharto R. Suryodipuro menjelaskan strategi diplomasi Indonesia dalam mendorong perdamaian di Myanmar, dan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, Guru Besar Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) memaparkan respon Indonesia terhadap krisis di Myanmar.